

Membantu Anak 'Bodoh' Dan Miskin Di Sekolah Kita

EDUCARE

Wahana Komunikasi Pendidikan



P. Paul Suparno, SJ

Salvation By Society

Prof. Dr. F.X. Armada Rianto

DAFTAR ISI

4

Sajian Utama



MALANG, EDUCARE: Banyak kalangan dari generasi tua termasuk di dalamnya para guru, merasa risih, prihatin, dan sedih ketika melihat polah-tingkah para mantan siswanya yang kini menjadi politikus tampil perlente, borjuis, dan klimis, tetapi perilakunya terkesan jauh dari nilai tatakrama dan cenderung arogan.



Profil

44

Merasakan aroma akademik Harvard University menjadi mimpi setiap mahasiswa di seluruh penjuru dunia, termasuk **Griselda Raisa Susanto (18)**, mahasiswa Semester VIII Universitas Parahyangan (UNPAR), Bandung. Apalagi moment yang tidak dinyana-nyana itu terjadi dalam event bergengsi *Harvard National Model United Nations (HNMUN)* yang melibatkan tidak kurang dari 3000 orang mahasiswa peserta yang menjadi duta dari kampus-kampus terpilih di seluruh penjuru dunia.

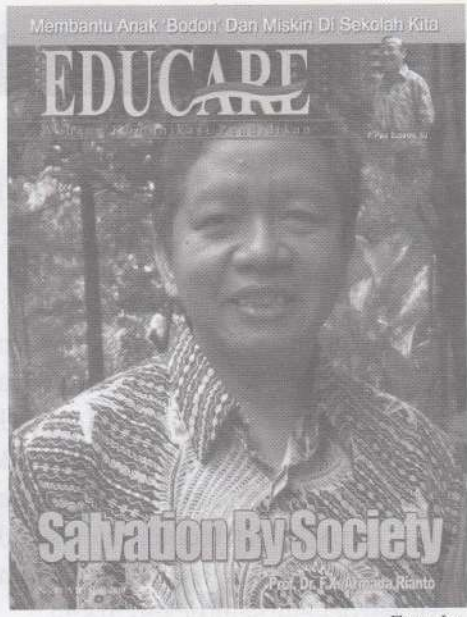


Foto Ist.

Daftar Isi	1
Kontak	2
Editorial	3
Dari Simposium MNPK	11
Dinamika Daerah	16
Opini	20
Info	32
Pembelajaran	39
Paradigma Pendidikan Reflektif..	46
eLVi Corner	49
Manajemen	52
Catatan Pendidikan	56
Psikologi	58
Bimbingan	60

Menakar Kekuatan Berbahasa
SMAK Seminari Garum
BILINGUAL CONTEST
 LINGKAT SLTP SE-KEUSKUPAN SURABAYA
 "BEING AN EFFECTIVE LEARNER"
 SMAK SEMINARI GARUM
 OKTOBER 2010

55

Gaul

Berubah Untuk Mengembalikan Citra Pendidikan Katolik

Oleh: Theodorus Sudimin ¹⁾

Banyak sekolah Katolik kehilangan pamor dan bahkan ditutup sudah lama terjadi. Banyak orang mempertanyakan perwujudan *option for the poor* dari beberapa sekolah Katolik yang menjadi sangat elitis dan berhasil mempertahankan status quonya sebagai sekolah papan atas, sementara banyak sekolah Katolik yang *kembang kempis* menderita kemiskinan “hidup segan mati tak mau”. Ada juga yang bahkan mempertanyakan kekatolikan sekolah Katolik. Yang tidak kalah menariknya adalah kemerosotan kualitas sekolah Katolik sampai ada sebuah sekolah yang bekerja sama dengan lembaga bimbingan belajar untuk mentraining siswa-siswinya guna menghadapi UN. Jarang ditemukan juara-juara kompetisi kompetensi, kreativitas dan inovasi guru yang berasal dari sekolah-sekolah Katolik.

Atas fenomena di atas, berbagai kalangan baik yang terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan maupun pemerhati pendidikan Katolik menyadari hal tersebut dengan berpikir bagaimana cara mengatasinya. Keuskupan Surabaya menetapkan tahun 2008 sebagai Tahun Pendidikan dengan melakukan kegiatan antara lain: penggalangan dana berupa kolekte khusus pada Perayaan Ekaristi hari Sabtu dan Minggu setiap minggu pertama dalam bulan (Majalah Harmoni, November 2009) dan Konser Peduli Sekolah Minus (www.mirifica.net). Keuskupan

Bandung mengadakan Seminar “Quo Vadis Sekolah Katolik di Keuskupan Bandung” dan Dialog tentang Pendidikan Katolik di Bandung. Para Uskup Indonesia ikut merasakan keprihatinan itu dengan mengadakan Hari Studi tentang Pendidikan di Jakarta, 3 - 4 November 2008. Hasil studinya dituangkan dalam Nota Pastoral (Nopas) KWI Tahun 2008 tentang Pendidikan berjudul “*Lembaga Pendidikan Katolik (LPK): Media Pawartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpihak Kepada Yang Miskin*”.

Menanggapi Nopas KWI tentang Pendidikan itu, Komisi Pendidikan Keuskupan Agung Semarang, bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, dan Bimas Katolik Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan “*Seminar Tantangan Pendidikan Katolik, Implementasi Nota Pastoral Pendidikan dan Nota Pastoral Ekonomi*” pada tanggal 30 Januari 2010. Pada seminar itu, penulis menyajikan makalah “Merajut Perubahan Menggapai Kembali Mimpi” dengan menekankan beberapa gagasan perubahan yang mendesak untuk dilakukan oleh sekolah-sekolah Katolik sesuai dengan alasan terbitnya Nopas Pendidikan, yaitu “menyadarkan Gereja akan kondisi LPK dewasa ini, dan perlunya melakukan gerakan pembaruan LPK” (No. 3). Gagasan utama makalah itu kami sajikan kembali dalam artikel ini dengan pengembangan dan penulisan kembali serta diperkaya dengan pendapat-pendapat dan sharing

para peserta.²

Perubahan sebagai Tuntutan Hakiki

Banyak hal menjadi penyebab menurunnya pamor sekolah Katolik. Apabila sebuah sekolah rusak parah karena banjir atau tanah longsor atau gempa bumi, itu berarti kerusakannya disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali manajemen sekolah. Tetapi menurunnya pamor sekolah Katolik lebih banyak disebabkan oleh semangat mempertahankan *status quo* dan cepat puas diri serta terlena dengan kejayaan masa lalu, sehingga tidak merespons perubahan-perubahan eksternal. Ini berarti untuk kembali menaikkan citra unggul sekolah Katolik, para penyelenggara, pengelola, dan pelaksana sekolah Katolik harus mau melakukan perubahan baik pada aspek yang hakiki sampai dengan aspek yang praktis.

Sekurang-kurangnya ada dua hal mengapa perubahan itu penting (Kasali, 2005:5-12). Pertama, perubahan adalah pertanda kehidupan. Semua organisme yang hidup akan selalu berubah, karena itu perubahan adalah hal yang hakiki bagi makhluk hidup. Institusi, termasuk institusi pendidikan adalah sesosok makhluk hidup karena digerakkan oleh manusia melalui manajemen. Hal itu berarti, LPK yang tidak berubah atau tidak merencanakan perubahan menunjukkan tanda-tanda kematian. Kedua, perubahan memberikan harapan. Perubahan, terutama yang direncanakan

diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih baik; membawa pembaruan. Janji-janji dan apalagi tindakan perubahan dapat memunculkan harapan akan terwujudnya sesuatu atau kondisi yang lebih baik.

Tetapi perubahan tidak selalu menghasilkan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa penyebabnya (Kasali, 2005:12-13). *Pertama*, kepemimpinan yang tidak cukup kuat. Kepemimpinan yang kuat bukan berarti pemimpin yang mampu menerapkan pola kepemimpinan diktator dan otoriter yang akan cenderung menjadi *single fighter* atau *one man show*, melainkan yang berwibawa karena bersih, ahli, dapat dipercaya, dan jelas arahnya. Dengan kewibawaan itu, pemimpin dapat menjadi penggerak semua anggota organisasinya. *Kedua*, salah melihat reformasi. Reformasi tidak cukup berhenti pada pelaksanaan reorganisasi, melainkan mengubah manusia. Sarana perubahan adalah mengubah manusianya, bukan organisasinya. Tanpa mengubah kebiasaan manusianya, reorganisasi tidak akan menghasilkan perubahan apa-apa. Program-program perubahan hanya akan menghasilkan perubahan sesuai yang diharapkan apabila ada perubahan pada manusia sebagai pelaku perubahan. *Ketiga*, sabotase di tengah jalan. Sebaik apapun pemimpin dan apapun perubahan yang direncanakan sangat mungkin ada anggota organisasi yang tidak suka entah karena terganggu kemapanannya atau hilangnya kenikmatan tertentu. Dengan berbagai cara mereka dapat mengacaukan organisasi dan mengganggu proses perubahan. *Keempat*, komunikasi yang tidak begitu bagus. Perubahan yang hanya mengandalkan komunikasi dan informasi resmi satu arah belum cukup. Karena itu akurasi dan kelengkapan informasi serta pemahaman informasi harus dijamin dan menjadi milik

bersama. Hal itu dimaksudkan untuk menekan persepsi subjektif. *Kelima*, masyarakat yang tidak cukup mendukung. Perubahan memerlukan dukungan masyarakat yang tampak pada tindakan-tindakan riil ketika suatu upaya digulirkan. *Keenam*, proses "*buy-in*" tidak berjalan. Perubahan harus menjadi agenda dan "*gawe*" semua anggota organisasi. Karena itu perubahan tidak dapat diserahkan hanya kepada pemimpin atau sekelompok orang dalam sebuah satgas.

Beberapa Gagasan Perubahan

Apa dan bagaimana perubahan yang harus dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan dan pelaksanaan LPK? Berikut ini tawaran beberapa ide perubahan untuk diperbincangkan dan dilaksanakan.

Pertama, Kesadaran dan Kemauan Bersama. Salah satu sikap yang membuat pamor LPK menurun adalah penyelenggara dan pengelola pendidikan cenderung mempertahankan status quo dan kurang tanggap terhadap perubahan karena terbuai kejayaan masa lalu. Karena itu Nopas ini harus dianggap sebagai "kokok ayam jago" yang membangunkan tidur selama puluhan tahun. Lonceng perubahan harus dibunyikan sekeras-kerasnya dan sesering mungkin dengan harapan perubahan itu menjadi kesadaran, kebutuhan, dan kemauan bersama seluruh anggota organisasi. Budaya *on going formation* dan *continuous improvement* untuk menjadi semakin unggul baik pada tingkat individu maupun institusi harus dibudayakan. Perubahan harus dimulai dari manusia dan tidak terjadi hanya karena dipercayakan kepada orang "kuat" atau satgas. Satgas boleh menjadi perencana dan penggerak perubahan, tetapi semua harus mau bergerak untuk berubah. Keunggulan sekolah Katolik berbasis

pada filosofi pendidikan sebagai pengembangan dan pendewasaan pribadi manusia utuh sesuai dengan tahap perkembangannya.

Kedua, Peran Pemimpin. Perubahan menuntut hadirnya pemimpin yang berwibawa, egaliter, dan visioner. Wibawa pemimpin tumbuh bukan karena otoritas yang dimiliki melainkan karena merupakan pribadi yang bersih, jujur, berkomitmen terhadap organisasi, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Para anggota organisasi termasuk sekolah memerlukan pemimpin yang mengedepankan kesamaan sebagai manusia meskipun secara struktural berbeda dalam hak-hak dan tanggung jawabnya. Pemimpin yang egaliter memudahkan untuk menjadi perekat, pengayom, dan sekaligus penggerak perubahan. Pemimpin juga harus memiliki visi jelas (visioner) karena visi itulah yang menuntun organisasi ke arah mana perubahan akan berjalan. Dengan mengacu dan mengembangkan gagasan Prof. John Kotter dari Harvard Business School, Lowney (2005:15-16) menyebutkan pemimpin berperan: (1) Menentukan arah, membangun visi tentang masa depan dan strategi-strategi untuk menciptakan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi tersebut. (2) Memadukan orang, mengomunikasikan arah yang akan ditempuh kepada semua pihak yang diperlukan kerja samanya untuk mempengaruhi terciptanya tim-tim dan koalisi-koalisi yang memahami visi dan strategi serta menerima validitasnya. (3) Memotivasi dan memberi inspirasi, menyemangati orang untuk mengatasi hambatan-hambatan politis, birokrasi, dan sumber daya untuk berubah dengan memuaskan kebutuhan manusiawi yang mendasar namun sering tak terpenuhi. Sebagian besar sebagai akibat dari tiga peran di atas yakni membuat

Para guru adalah motor proses pendidikan dan sangat menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Para guru bukan sumber daya manusia yang dapat diperlakukan bagaikan mesin pendidikan.

perubahan, yang seringkali mencapai tingkatan dramatis. Tugas itu akan semakin efektif apabila pemimpin menghayati dan mendasarkan diri pada nilai-nilai (Lowney, 2005:11):(1) Kesadaran diri untuk memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, dan pandangan hidupnya.(2) *Ingenuitas* (kecerdikan dan fleksibilitas) kemampuan untuk berinovasi dan beradaptasi terhadap dunia yang terus berubah.(3) Cinta kasih yakni kesediaan untuk terlibat dan melibatkan orang lain dengan sikap positif yang memungkinkan perkembangan potensi dan bakat terpendam mereka.(4) Heroisme yang menyemangati diri sendiri dan orang-orang lain dengan ambisi dan hasrat-hasrat heroik untuk melakukan segala sesuatu secara tuntas dan prima.

Berkenaan dengan karakteristik kepemimpinan ini, para Uskup menuntut supaya para penyelenggara dan pengelola LPK “memiliki integritas, kemampuan berkomunikasi, bersikap visioner dalam kepemimpinan dan manajemen. Mereka perlu meningkatkan kemampuan manajerial dan memahami perubahan dunia pendidikan. Untuk itu diperlukan semangat belajar terus-menerus,

semangat rendah hati, dan pembaruan semangat merasul” (No. 8.6). Apabila sungguh-sungguh mau berubah dalam tindakan nyata, LPK harus “memprovokasi” para pimpinan baik pada tingkat penyelenggara maupun pengelola dan dalam jangka panjang harus menyiapkan pemimpin secara serius, tersistem, dan terprogram.

Ketiga, Kualitas Guru. Para guru adalah motor proses pendidikan dan sangat menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Para guru bukan sumber daya manusia yang dapat diperlakukan bagaikan mesin pendidikan. Mereka merupakan manusia utuh dari banyak dimensi yang menanggapi panggilan mulia mencerdaskan sesamanya. Justru karena dimensi banyak itu para guru harus diperlakukan sebagaimana layaknya manusia, yang memerlukan pemenuhan aneka kebutuhan dasar, fisik, sosial, emosional, spiritual. Para penyelenggara dan pengelola pendidikan yang berasal dari biarawan-wati jangan memperlakukan para guru seperti dirinya. Para guru awam adalah sekaligus warga masyarakat yang harus memenuhi kebutuhan keluarga dan sosial yang biayanya semakin tak terjangkau. Selain itu penyelenggara dan pengelola sekolah-sekolah Katolik harus senantiasa mengupayakan peningkatan kualitas guru baik melalui pendidikan formal maupun berbagai pelatihan yang lebih dari sekedar memenuhi standar tuntutan UU dan formalitas ijazah atau sertifikat, dan mendorong para guru untuk berkreasi dan berinovasi. Dalam upaya memenuhi kualifikasi pendidikan S1 para guru, sekolah Katolik harus berani menyediakan beasiswa. Disinyalir, selama ini banyak guru, dan tentu sepengetahuan manajemen sekolah, mengambil program S1 sekedar mendapatkan sertifikat, tanpa diikuti peningkatan keahlian keguruan dan kependidikannya. Apabila menyediakan biaya pendidikan, sekolah

dapat meminta guru memilih program S1 di lembaga yang berkualitas.

Keempat, Peran Gereja dan Solidaritas. Peran Gereja dalam sekolah Katolik memiliki landasan yang kuat. Dokumen Konsili Vatikan II tentang Pendidikan Kristen *Gravissimum Educationis* menyatakan: Konsili suci dengan sangat menganjurkan kepada para Gembala Gereja dan segenap umat beriman, supaya tanpa mengorbankan mana pun membantu sekolah-sekolah Katolik, untuk makin sempurna menjalankan tugasnya, dan terutama untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan mereka yang miskin harta duniawi, atau hidup tanpa bantuan atau kasih sayang keluarga, atau masih jauh dari kurnia iman (Art 9 par 3). Sungguh, hirarki atau otoritas gerejawi tidak dapat tinggal diam dengan sekolah-sekolah Katolik, karena ketika suatu sekolah diijinkan menggunakan nama Katolik, otoritas gerejawi berwenang untuk membimbingnya (Kan 803).

Menterjemahkan kutipan kedua dokumen itu, Gereja dari segala tingkatan hirarki harus melakukan tindakan konkret, termasuk inisiator dan fasilitator kerja sama. Artinya, Nopas KWI ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata baik oleh otoritas gerejawi maupun para penyelenggara –pengelola–pelaksana sekolah-sekolah Katolik. Contohnya, Keuskupan Surabaya membuat program “Umat Katolik dan Paroki Peduli Sekolah” dengan model kolekte kedua Sabtu-Minggu pertama tiap bulan dikhususkan untuk sekolah-sekolah Katolik (Majalah Harmoni, November 2009). Para pengusaha Katolik baik melalui pribadi atau yayasanya, seperti *Sampurna Foundation*, dapat dilibatkan dalam proses pendanaan sekolah. Selama ini yang berjalan adalah subsidi silang antarsekolah di bawah satu yayasan. Semangat solidaritas ini harus diperluas bentuknya. MPK harus lebih kreatif dan progresif. Kerja sama sangat

kecil kemungkinan terwujudnya apabila diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk berinisiatif. Misalnya: kebijakan iuran berdasarkan jumlah siswa baru yang diterima dan dikalikan tariff yang disepakati bersama. Dari dana yang terkumpul itu, MPK dapat mengalokasikan dana entah untuk membantu membangun gedung, perbaikan sarana prasarana atau beasiswa terutama untuk sekolah-sekolah yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan.

Sekolah-sekolah Katolik yang memiliki sumber daya lebih dapat menawarkan kelebihanannya untuk digunakan bersama dengan sekolah lain. Kerja sama ini hanya dapat diwujudkan apabila sekolah-sekolah Katolik bersungguh-sungguh mengembangkan dan menghayati semangat solidaritas. "Jika tidak ada solidaritas dan kerja sama di kalangan sekolah, mereka mungkin menyimpang dari visi pendidikan yang diajarkan Gereja" kata **Suster Agnes Chu Nan-tzu**, Kepala Sekolah Menengah Putri "Stella Matutina" di Taichung Taiwan (www.mirifica.net -19/12/2006). Kerja sama yang didasari oleh semangat solidaritas ini sungguh diharapkan oleh para Bapa Konsili, "supaya antara sekolah-sekolah Katolik koordinasi makin dipererat" (GE 12). Apabila semangat solidaritas yang menggerakkan kerja sama dan disertai dengan keterlibatan pimpinan Gereja dapat berjalan, kisah sedih seorang guru agama Katolik tidak perlu terjadi. Dalam seminar Tantangan Pendidikan Katolik, seorang guru mensharingkan pengalamannya ketika anaknya yang secara akademik unggul dan memenuhi syarat untuk masuk sebuah sekolah Katolik, gagal masuk sekolah tersebut saat wawancara. Kita paham, wawancara itu untuk "tawar menawar jual beli kursi sekolah." Karena guru itu adalah keluarga miskin, maka ia tidak mampu "membelikan kursi sekolah" untuk anaknya. Guru itu sebagai orang

tua sesungguhnya ingin menjalankan anjuran para Bapa Konsili (GE 8) yang ditegaskan kembali oleh para Uskup (Nopas 4.2) untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Katolik. Tetapi apa boleh buat sebuah sekolah Katolik telah menghalanginya.

Organ Gereja untuk bidang pendidikan pada semua tingkatan harus menjalankan perannya sebagai fasilitator kerja sama dan bersungguh-sungguh untuk mengusahakan semua sekolah Katolik dapat menjalankan misinya dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa, tetap setia pada asas-asas ajaran Gereja, dan menghidupi dengan semangat pendiri dan nama pelindung sekolahnya. Dengan kesetiaan menjalankan misinya yang dibantu oleh Gereja, maka sekolah-sekolah Katolik dapat menjadi pewarta Kabar Gembira dan menjadi tempat yang nyaman untuk setiap anak dari keluarga Katolik. Banyak anak dari keluarga Katolik bersekolah di luar sekolah Katolik dengan pertimbangan lebih murah dan sekaligus bermutu lebih baik tetapi akibatnya adalah kehidupan kekatolikannya kurang diperhatikan. Apakah Gereja akan tetap tutup mata terhadap situasi ini.

Kelima, Membangun Branding. Sekolah-sekolah Katolik yang mulai tenggelam atau belum dikenal masyarakat harus melakukan *branding* untuk membangun opini dan menarik perhatian publik. Caranya? Sarana dan prasarana adalah unsur yang kasat mata (*tangible*) dan dapat menimbulkan kesan sementara sebuah sekolah bermutu atau tidak. Karena itu sekolah-sekolah Katolik, dan tentu saja atas bantuan kerja sama, harus menyediakan dan membangun sarana prasarana yang dapat memberikan kesan positif terhadap sekolahnya. Cara lain adalah Aksi - Kreasi dan Media, yaitu sekolah-sekolah perlu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kreatif yang dapat melibatkan banyak pihak termasuk

peliputan oleh media masa. Pada era teknologi informasi ini peran media menjadi sangat penting bagi siapapun. Cara masa lalu dengan membiarkan orang-orang datang sendiri harus diubah dengan cara melakukan segala sesuatu yang membuat banyak orang datang ke sekolah. Karena itu sekolah harus memiliki sesuatu yang *marketable*.

Keenam, Pendidikan Kewirausahaan. Salah satu kekuatan LPK adalah filosofi pendidikannya sebagai proses pengembangan dan pendewasaan pribadi manusia secara utuh. Semua potensi dan kecerdasannya dikembangkan secara optimal dan berimbang hingga menjadi pribadi yang mandiri termasuk di bidang ekonomi. LPK dalam menyelenggarakan proses pendidikan dapat berperan untuk menyelipkan dan bahkan melatih jiwa dan perilaku kewirausahaan. Pendidikan kewirausahaan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya jiwa kemandirian secara ekonomis pada para peserta didik sehingga kelak mampu "menciptakan" kerja dan bukan "diberi" balas jasa penghasilan. Kelak mereka tidak bekerja mengabdikan kepada orang lain melainkan dapat mempekerjakan orang-orang lain. Nilai lebihnya dari pendidikan jiwa dan perilaku kewirausahaan sejak anak-anak berada pada fase pendidikan dasar dan menengah adalah mengarahkan hidupnya pada usaha kemandirian ekonomi dan sekaligus membuka lapangan kerja bagi sebanyak mungkin orang. Melalui pendidikan kewirausahaan, jiwa sosial dapat bertumbuh dengan baik.

Kemandirian ekonomi ini sudah lama diajarkan oleh **Mgr. Albertus Soegijapranata SJ**. Dalam berbagai kesempatan beliau (**Moeryantini**, 1975) menganjurkan agar keluarga-keluarga Katolik berusaha mandiri secara ekonomi. Kepada para keluarga guru yang pada masa penjajahan Jepang tidak mendapatkan gaji, dianjurkan agar

Pemikiran Mgr. Soegijapranata ini menjadi tantangan bagi para penyelenggara dan pengelola pendidikan sesuai dengan konteks zaman ini dan dapat segera diwujudkan. Pemikirannya ini ditegaskan kembali oleh para Uskup dalam Nopas KWI tentang Ekonomi.

melakukan perdagangan kecil-kecilan. Dalam ceramah pembukaan pertemuan Panitia Sosial Para Wali Gereja Indonesia di Yogyakarta 11 – 16 Agustus 1957, beliau menyatakan, “dengan hidup yang serba sederhana, bersahaja dan ughari, dengan bekerja yang keras, golongan Katolik patutlah merupakan golongan yang ekonomis dapat berdiri sendiri, mampu memenuhi keperluan hidup perse-orangan dan bersama tiada dengan sokongan dari manapun juga” (Moeryantini, 1975:69).

Demi terwujudnya keluarga-keluarga Katolik yang mandiri secara ekonomi, sekolah-sekolah Katolik harus membekali semangat kewirausahaan. Pernyataan Mgr. Soegijapranata berikut ini menggambarkan hal tersebut: “dalam rangka pembangunan bidang sosial ekonomi, dianjurkan kepada sekolah-sekolah puteri agar pengetahuan dan keterampilan kewanitaan agar lebih diberi tempat, agar kelak bekas siswi dapat menjadi ibu-ibu yang mampu mengemudikan rumah tangganya secara baik dan sehat” (Moeryantini, 1975:70). Masih dalam ceramah pembukaan pertemuan

Panitia Sosial Para Wali Gereja Indonesia itu, beliau menyatakan, dari pihak Katolik masih kurang beberapa macam sekolah, yang mendidik dan mempersiapkan calon pekerja, calon petani, calon penjual dan pedagang kecil, yang mampu mencahahi nafkah sendiri tidak dengan mengabdikan diri kepada orang lain, tetapi dengan berdikari sendiri dan merdeka. Segala sesuatunya hendaknya bercorak sederhana dan bersahaja, setingkat dengan keadaan dan kemampuan masyarakat pada umumnya (Moeryantini, 1975:95).

Pemikiran Mgr. Soegijapranata ini menjadi tantangan bagi para penyelenggara dan pengelola pendidikan sesuai dengan konteks zaman ini dan dapat segera diwujudkan. Pemikirannya ini ditegaskan kembali oleh para Uskup dalam Nopas KWI tentang Ekonomi.³

Penutup

Pepatah Jawa yang mengatakan *ngeli tanpa keli* kiranya cocok untuk dihayati oleh LPK zaman ini. Adanya kecenderungan terjadinya proses kapitalisasi dan liberalisasi pendidikan akan mengancam eksistensi dan kekhasan LPK apabila tidak tetap teguh memegang semangat pendidikan Gereja sebagai wahana pendidikan karakter dan pewartaan Injil. Tuntutan pragmatisme intelektual masyarakat dapat mereduksi hakikat pendidikan Katolik menjadi semata-mata pengayaan pengetahuan secara intelektual alias akademis melulu yang diukur dengan tingginya nilai. Banyak sekolah Katolik telah terjebak pada tuntutan masyarakat ini. Akibatnya adalah lembaga bimbingan belajar menjamur dan peminatnya jauh lebih banyak dibandingkan sekolah-sekolah Katolik tertentu yang semakin tidak diminati masyarakat. * **Dosen Tetap dan Wakil Dekan I FE Unika Soegijapranata Semarang.**

BACAAN: Drost, J.I.G.M (1998), *Sekolah: Mengajar atau Mendidik?*, Yogyakarta: Kanisius; Drost, J (1999), *Proses Pembelajaran sebagai Proses Pendidikan*, Jakarta: Grasindo. Harefa, Andrias (2000), *Menjadi Manusia Pembelajar*, Jakarta: Harian Kompas; Kasali, Rhenald (2005), *Change: Tak Peduli Berapa Jauh Jalan Salah yang Anda Jalani, Putar Arab Sekarang Juga (Manajemen Perubahan dan Manajemen Harapan)*, Jakarta: Gramedia; Konferensi Waligereja Indonesia (2006), *Nota Pastoral Habitus Baru: Ekonomi Yang Berkeadilan – Keadilan Bagi Semua: Pendekatan Sosio-Ekonomi*, Jakarta; Konferensi Waligereja Indonesia (2008) *Nota Pastoral tentang Pendidikan Lembaga Pendidikan Katolik: “Media Pewartaan Kabar Gembira, Unggul dan Lebih Berpibak kepada yang Miskin”*, Jakarta; Lowney, Chris (2005), *Heroic Leadership, Praktik Terbaik “Perusahaan” Berumur 450 tahun yang Mengubah Dunia*, Jakarta: Gramedia; Moeryantini, Henricia (1975), *Mgr. Albertus Soegijapranata S.J*, Ende: Nusa Indah; Yohanes Paulus II (1990) *Konstitusi Apostolik tentang Universitas Katolik Ex Corde Ecclesiae*, Jakarta: Departemen Dokpen KWI.

Footnotes

¹ Pendidik dan Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang.

² Pembaca diandaikan telah membaca Nota Pastoral tentang Pendidikan yang judulnya telah dituliskan pada artikel ini dan alangkah baiknya apabila juga membaca Nota Pastoral HABITUS BARU: EKONOMI YANG BERKEDAILAN. Keadilan Bagi Semua: Pendekatan Sosio – Ekonomi, Konferensi Waligereja Indonesia, tahun 2006.

³ Nota Pastoral HABITUS BARU: EKONOMI YANG BERKE-ADILAN. Keadilan Bagi Semua: Pendekatan Sosio – Ekonomi, Konferensi Waligereja Indonesia, tahun 2006, terutama tentang Prioritas dan Beberapa Langkah Strategis No. 30 butir pertama, kedua, dan ketiga.

DITERBITKAN OLEH
Komisi Pendidikan KWI

Pelindung
Mgr. Aloysius Sudarso, SCJ

**Pemimpin Umum/
Penanggungjawab**
Heribertus Sumarjo, FIC

Pemimpin Redaksi
Dr. Ir. P.M. Winarno, M.Si.

Wakil Pemimpin Redaksi
Hermanus Mifa, S.E.

Sekretaris Redaksi
V.A. Rosa Nuning

Dewan Redaksi
R.D. Laurentius Totok Subiyanto
Br. Frans Sugi, FIC
Dra. Juliana Sujadi, M.Ed.
R.D. Yonas Atjas
R.D. Daniel Aka
Drs. Jan Berchmans Tethool
Drs. B. Djokodihatmono, M.A.
Sr. Yustiana, CB, M.Pd.
R.D. Drs. Karolus Jande, M.H
Drs. R. Angkowo
Prof. Dr. J. Sumarsono, M.Ed.
Nasarius Sudaryono, S.Pd., M.Si.

Redaktur Pelaksana
Hermanus Mifa, S.E.

Staf Redaksi
Johanes Parsunu, S.Pd
Drs. Arcadius Benawa, M.Pd
Laurentius B Sadewa, S.H

Desain Grafis
Adi Loviantoro

Keuangan
V. A. Rosa Nuning

Distribusi - Iklan
Andreas Adi

Alamat Redaksi & Distribusi
Jl. Cut Mutiah 10, Tromol Pos 3044
Jakarta 10340, Telp. (021) 31937558
Fax. (021) 31907220
E-Mail: komdik@kawali.org

Rekening
BCA. KCP Gondangdia
No. 455.115.9811
An. H. Sumarjo / V.A. Rosa

Pembebasan Yang Miskin dan Bodoh

Pembaca yang budiman,

Selamat Hari Raya Paskah 2010 kepada para pembaca yang merayakannya. Kini usia EDUCARE memasuki tahun penerbitan ke-VII, Nomor 1, April 2010. Untuk ini, kami menghaturkan syukur kepada TUHAN dan terima kasih atas kerja sama para pembaca, pelanggan, dan kontributor sehingga majalah ini tetap terbit.

Nota Pastoral KWI Tahun 2008 tentang Pendidikan memberi amanat kepada Lembaga Pendidikan Katolik (LPK), a.l. agar lebih berpihak kepada yang miskin. Amanat ini menginspirasi edisi ini mengangkat tema "*Salvation By Society, Pembebasan Bagi yang Miskin dan Yang Bodoh*". Tujuannya menggali gagasan sekitar upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah dan masyarakat untuk menyelamatkan peserta didik yang miskin dan bodoh agar tetap mengikuti pendidikan yang membuat mereka mandiri.

Dalam konteks Paskah, bagaimanakah LPK bangkit merayakan keselamatan bagi yang miskin dan bodoh? "Jika hari-hari ini hidup bangsa Indonesia masih diliputi aneka bentuk korupsi dan manipulasi politik, pewartaan Paskah merupakan desakan nyata untuk semuanya dalam merealisasikan kabar keselamatan. Nota Pastoral KWI 2003 dan juga sesudahnya memiliki pesan yang tetap aktual," tutur Ketua STFT Widya Sasana, Malang, **Pastor Prof. Dr. E. Armada Riyanto, CM** kepada EDUCARE. Ke depan, menurutnya, dunia pendidikan harus mau bergumul dengan upaya menyelamatkan bangsa keluar dari krisis. Resepnya ialah memberikan pendidikan humanis (*Sajian Utama 1*).

Searah pendidikan humanis, gagasan-gagasan penyelamatan dalam *Opini* juga mengingatkan pentingnya praksis pendidikan yang membebaskan ala **Paulo Freire**, perlunya pendidikan kewirausahaan untuk menumbuhkan jiwa kemandirian peserta didik sehingga kelak mampu menciptakan kerja, perlunya penanaman kesadaran kepada peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. **Pastor Dr. Paul Suparno SJ** memperkaya wawasan kita dalam membantu anak "bodoh" dan miskin di sekolah.

Dr. R. Kunjana Rahardi dalam *Catatan Pendidikan* mengingatkan, *salvation by society* yang berhakikat pemberdayaan dari sesama warga masyarakat, untuk sesamanya yang juga warga masyarakat itu haruslah dilandasi dengan semangat dan kesadaran merasa senasib(solider)dengan sesamanya yang menderita, miskin, dan tersingkir. Selama ini perwujudan semangat solider atau '*holobis kontul baris*' ini sudah mekar di sekolah ataupun perguruan tinggi dalam aneka gerakan: Aksi Solidaritas Pendidikan, Gerakan Orang Tua Asuh, Bea Siswa, dsb. Untuk efektivitasnya memang masih diperlukan kepekaan sosial dan kepemimpinan yang menggerakannya.

Salah satu model kerjasama penyelamatan oleh sekolah dan masyarakat untuk mengatasi biaya sekolah siswa miskin diungkapkan oleh Ketua Yayasan Tarakanita Wilayah Yogyakarta, **Sr Margaretha Surani CB**. Simak artikel *Pendidikan "Gaduh Sapi" Ala Para Suster CB di Lereng Merapi (Sajian Utama 2)*. Sharing pengalaman 50 tahun **Prof. Dr. John Tondowijoyo, CM** mengentaskan kemiskinan putra-putri bangsa, kiranya meneguhkan kita untuk meneruskan kebajikan para pendahulu.

Kami berharap topik edisi ini membawa inspirasi! **HM*****